

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Jepang merupakan salah satu negara yang harus menganggung kekalahan saat perang dunia kedua terjadi. Seiring berjalannya waktu, kekalahan Jepang atas sekutu pada perang dunia kedua menimbulkan dampak yang signifikan bagi Jepang, khususnya dalam bidang pertahanan. Pasca perang dunia kedua selesai, sebagai negara yang kalah dalam perang Jepang diwajibkan untuk tidak memiliki pasukan bersenjata baik angkatan darat, udara, maupun laut yang di legitimasi melalui Undang-Undang pasal 9 Jepang yang menyatakan bahwa Jepang tidak akan menggunakan kekuatan militer sebagai langkah dalam menyelesaikan suatu masalah internasional dengan negara lain. Di satu sisi, Jepang dan AS menandatangani pakta pertahanan sebagai gantinya dimana pasukan Amerika Serikat akan menjaga Jepang sebagai jaminan atas keamanan dan pertahanan bagi Jepang. Seiring berjalannya waktu dan dinamika yang terjadi secara global, kebijakan ini seakan tidak berjalan dengan baik. Perang Korea, Vietnam, dan Afghanistan serta Irak membuat Jepang cenderung pesimis dengan janji AS dalam melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah Jepang. Konstelasi politik global yang berubah serta perubahan orientasi fokus AS membuat Jepang melakukan inisiasi dalam membentuk pasukan keamanan internal yang bernama *National Police Reserve* yang seiring berjalannya waktu bertransformasi menjadi *Japan Defence Force* yang memiliki kapabilitas pertahanan yang terbatas dalam melindungi internal Jepang.

Pada tahun 2013, China telah memilih pemimpin barunya yaitu Xi Jinping. Dalam proses kepemimpinannya Xi Jinping telah melakukan beberapa perubahan serta peningkatan kapabilitas maupun peran China secara progresif, khususnya di wilayah Asia Timur. Kebijakan-kebijakan tersebut seperti: peningkatan anggaran militer, perombakan internal angkatan bersenjata China, serta kebijakan luar negeri yang mengedepankan militer dan keamanan yang terlihat dari kebijakan Xi yang mencoba untuk mengambil alih kepulauan Senkaku/Diayou melalui kebijakan-kebijakan militeristik yang membuat Jepang sebagai negara berdaulat terancam oleh perilaku yang dilakukan oleh China di kawasan Asia Timur. Terlebih lagi jika dilihat berdasarkan sejarah, Jepang dan China memiliki hubungan yang cukup kelam pada masa perang

dunia kedua dimana Jepang sempat menjajah China dengan waktu yang cukup lama dan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat disana.

Dalam situasi yang anarki, Jepang sebagai negara berdaulat harus menjaga eksistensi dan kedaulatannya agar dapat *survive* di dalam percaturan politik internasional. Sebagai negara yang rasional, *self help* diperlukan mengingat ancaman China yang semakin nyata jika tidak dibendung oleh kebijakan yang baik. Dalam hal ini Jepang yang tidak dapat lepas dari pengaruh politik AS telah sepakat untuk melakukan penandatanganan *Japan-US Defence Guidelines* sebagai kebijakan Jepang yang progresif guna mempertahankan *status quo* nya sebagai negara yang memiliki keterbatasan konstitusi mengenai penggunaan pasukan bersenjata dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Kebijakan yang diambil Jepang adalah tepat mengingat hasil beberapa poin diskusi dimana Jepang akan dibantu oleh AS jika Jepang diserang oleh negara lain. Kemudian dalam membantu pertahanan Jepang, AS telah bersedia untuk meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang pertahanan sebagai upaya AS dalam membantu Jepang dalam menghadapi ancaman. Selain itu, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Jepang telah diizinkan untuk membantu negara ketiga dalam menghadapi ancaman yang secara tidak langsung berdampak pada keamanan Jepang.

Saran

Menanggapi kasus yang dihadapi oleh Jepang perihal ancaman dari China di kawasan Asia Timur, penulis menyarankan sebaiknya kerjasama pertahanan antara Jepang dengan AS dilanjutkan mengingat Jepang tidak memiliki konstitusi resmi mengenai respon penggunaan bersenjata dalam penyelesaian permasalahan. Selain itu, sumber daya pertahanan yang belum mumpuni juga dapat mempengaruhi kapabilitas Jepang jika di masa depan ketika China dan Jepang mendeklarasikan perang. Untuk itu pemanfaatan *Japan-US Defence Guidelines* pada tahun 2015 di rasa perlu untuk mempersiapkan kapabilitas pertahanan Jepang ke depannya. Namun, untuk terciptanya sinergi antara kedua belah pihak dalam mendapatkan kepentingannya Jepang harus memiliki itikad baik terhadap AS sebagai aliansi Jepang yang dapat melindungi Jepang dari segala ancaman yang mengancam eksistensi Jepang.